

PELAKSANAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR

Kismawati¹, Fatmawati², Jaelan Usman³

¹) Mahasiswa, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²) Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³) Dosen, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the implementation of garbage retribution in Tamalanrea district of Makassar City and the factors that influenced it. The type of research used was descriptive qualitative by using two kinds of data those were primary data and secondary data. The data was analyzed descriptively qualitative that was analyzing all data that succeed in collecting writer and showed in the form of sentence in accordance with result of interview from 11 informants which previously had been specified. Technique of collecting data using 4 indicators those were observation, interview, literature, study and document. The result of the research showed that the implementation of garbage retribution in Tamalanrea District had 4 indicators, namely (1) division of tasks those were not carried out maximally, (2) regulations were not understood yet by some people, (3) good community participation, (4) socialization which was not evenly distributed throughout the society.

Keywords: *Implementation, Garbage, Retribution*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisis semua data yang berhasil di kumpulkan penulis dan selanjutnya di tampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan hasil wawancara dari 11 informan yang sebelumnya telah di tentukan. Teknik pengumpulan data menggunakan 4 indikator yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea terdapat 4 indikator yaitu (1) pembagian tugas yang tidak di laksanakan dengan maksimal, (2) peraturan yang belum di pahami oleh sebagian masyarakat, (3) partisipasi masyarakat sudah baik, (4) sosialisasi yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: *pelaksanaan, retribusi persampahan.*

PENDAHULUAN

Retribusi sebagai salah satu pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat membantu masalah yang terdapat di dalam aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Tamalanrea menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah persampahan yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Makassar cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Maka dari itu pemerintah melakukan suatu kebijakan dalam hal ini pemungutan

retribusi persampahan yang dilakukan oleh Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi persampahan. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan retribusi persampahan yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana pengelolaan retribusi persampahan tidak terlepas dari pelaksanaan yang akan menunjang terpenuhinya target retribusi. Pelaksanaan ini merupakan fungsi yang penting, karena pelaksanaan berhubungan dengan manusia sebagai objek langsung. Pelaksanaan adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme ke arah tujuan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Sesuatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, serta adanya mekanisme dari suatu system. Implementasi atau pelaksanaan tidak hanya sekedar aktivitas menonton belaka, tetapi merupakan suatu kegiatan yang terencana secara baik yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu menurut Usman (2002)

Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan

Sedangkan menurut harsono (2002) mengemukakan bahwa, implementasi atau pelaksanaan suatu

proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi kebijakan dari tindakan politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Tjokroadmudjoyo, dalam Adisasmita (2011) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan.

Fungsi pelaksanaan dari beberapa buku di antaranya:

Motivasi, Memberi arahan, mempengaruhi, memberikan perintah. Istilah tersebut di anggap sama sebagai penggerakan, pelaksanaan, pembimbingan program /kegiatan A.A Muninjaya (2004). Fungsi ini merupakan fungsi

penggerak semua kegiatan program atau di tetapkan sebagai fungsi pengorganisasian, dan di rumuskan dalam fungsi perencanaan. Pada fungsi pelaksanaan ini lebih menekankan bagaimana pimpinan menggerakkan dan mengarahkan semua sumber daya, serta berbagai aktivitas yang saling terkaitserta bersifat komplek untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati. Tujuan, fungsi penggerakan dan pelaksanaan A.A Muninjaya (2004) adalah sebagai berikut: (a) Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. (b). Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. (c) Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. (d) Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi, prestasi.

Retribusi mengacu kepada pungutan dari daerah yang dikenakan hanya kepada pihak yang diberikan jasa tertentu atau izin khusus untuk mengelola kekayaan daerah. Hal tersebut tentu berbeda dengan pajak yang diatur secara langsung oleh pemerintah dan dikenakan secara menyeluruh untuk masyarakatnya.

Menurut Mardiasmo (2009) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau cirri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya yang terdiri atas aspek kualitas dan kuantitas. Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Retribusi daerah merupakan salah satu PAD (Pendapatan Asli

Daerah) yang dapat membantu pembangunan dan perekonomian daerah. Menurut UU RI NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menyatakan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah, yaitu: Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai

Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan Marihot Pahala Siahaan, (2010). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat. Manik (2003) mendefinisikan sampah sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus

dibuang, yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.

Pelaksanaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tehni. Dimana langkah ini akan dilakukan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang di miliki oleh organisasi agar mendapatkan hasil yan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan oleh suatu organisasi

Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Menurut Hasibuan (2007). Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Menurut Soejanto, (2005) peraturan adalah “peraturan tata tertib disekolah selalu dilengkapi dengan sanksi-sanksi tertentu, yang berpuncak

kepada pemberian hukuman”. Adanya peraturan itu untuk menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup social itu dapat dicapai. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian dilaksanakan setelah mengikuti seminar proposal kurang lebih 2 bulan pada tanggal 13 juni sampai 12 agustus dan bertempat Di Kantor Camat Tamalanrea Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. metode penelitian ini berdasarkan pada metode ini dianggap sangat relevan. Karena penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif, yaitu

menggambarkan apa adanya dari kejadian yang diteliti. Selain itu guna memperoleh data yang objektif dan valid dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada. .

Berdasarkan sifatnya data ini menggunakan data kualitatif . data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dalam bentuk tulisan yang dicermati oleh peneliti. penelitian ini akan dikatakan valid apabila jelas sumber datanya penelitian ini akan dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. Sedangkan informan yang di gunakan sebanyak 11 informan.

Sumber data dapat dilakukan melalui beberapa cara. (1) Data Primer Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara di lapangan. (2) Data Sekunder. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian.

Guna memperoleh data informasi serta keterangan-keterangan bagi kepentingan penulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut: observasi, wawancara, studi kepustakaan,

dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, untuk menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan pemungutan retribusi persampahan. Dari hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan secara kualitatif tentang realitas pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Pengabsahan data dilakukan agar peneliti dapat memperkuat data penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah retribusi persampahan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2011. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat

perbandingan antara target dan realisasi. retribusi sampah selalu mengalami naik turun dari target yang ditentukan. Hal ini pula dikarenakan warga telah memiliki lahan sendiri untuk membuang sampah. Adapun jumlah pekerja atau tenaga operasional sampah saat ini masih kurang, sehingga tidak seimbang dengan pekerjaan yang harus mereka selesaikan dimana dalam satu mobil angkutan sampah itu dibutuhkan tiga sampai empat orang sedangkan yang ada sekarang hanya dua orang. Oleh karena itu, butuh waktu lebih untuk mengangkut sampah setiap hari. Pelaksanaan retribusi masih perlu adanya sarana berupa tenaga kerja dari kecamatan agar lebih maksimal dalam pelaksanaan retribusi persampahan. Banyaknya jumlah sampah yang ada di Kecamatan Tamalnrea membuat petugas kewalahan dalam menanganinya. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Jika di lihat dari hasil wawancara maka usaha yang di lakukan belum bisa membuahkan hasil yang memuaskan, itu di lihat

karena kurangnya tenaga kerja berupa jumlah armada yang masih kurang.

Agar pelaksanaan berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan pemungutan ini dapat berjalan dengan efektif dan lancer. Banyaknya masyarakat yang acuh dengan retribusi seharusnya pihak kantor memberikan penekanan terhadap masyarakat yang acuh dengan retribusi, bukannya menempatkan petugas yang memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi. Memilih kolektor juga seharusnya di lihat bagaimana keadaan kolektor yang bertugas agar lebih bertanggung jawab dengan tugasnya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan bahwa UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berkaitan dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

atas UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah daerah berlaku dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintah Negara.

Hal-hal yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reformasi dalam UU pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan UU Nomor 28 Tahun 2009. Dalam bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan perda kota Makassar No. 11 Tahun 2011 pasal 9 di mana struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Perda tersebut menunjukkan wajib retribusi untuk semua masyarakat. Retribusi persampahan itu sendiri di golongan dalam Jasa Umum. Sesuai dengan perda tersebut maka pasal 9 menyatakan bahwa Struktur dan besar tarif retribusi persampahan/kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, bangunan, institusional, industri dan perdagangan. Masih ada masyarakat yang tidak paham dengan peraturan pemerintah tentang retribusi sampah, meskipun peraturan tersebut sudah lama ada. Sedangkan dalam peraturan wali kota makassar no 6 tahun 2015 tentang peninjauan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kota Makassar tahun 2015 di mana telah tertera berbagai macam retribusi yang berkaitan dengan jenis, lokasi, Volume dan tarif. beragamnya

pemikiran masyarakat yang membayar tertribusi sehingga berpengaruh pada jumlah retribusi yang akan di terima dimana ada masyarakat yang mengerti tentang retribusi ada sebagian lagi masyarakat yang belum terlalu paham dengan retribusi sampah.

Sebagian masyarakat telah memikirkan akibat yang dapat terjadi apabila mereka terus menerus membuang sampah sembarangan. Seperti pepatah yang sering kita dengar “bersih pangkal sehat”. Jadi jika kita ingin sehat, maka kebersihan yang harus menjadi awal untuk mencapai tujuan itu. Lalu jika di kaitkan dengan agama maka bunyinya bersih adalah sebagian dari iman. Membuang sampah pada tempatnya juga mencegah banjir. Banjir sudah menjadi bencana rutin. Sudah jelas penyebabnya karena sampah yang berhamburan dimana-mana. Sampah akan menghambat aliran air. Jika kita membuang sampah pada tempatnya, maka akan mencegah banjir. Selain itu membuang sampah pada tempatnya juga Mencegah bau tidak sedap. Bau tidak sedap dari sampah sangat

mengganggu kesehatan. Maka untuk mengurangi bau tidak sedap, kita harus membuang sampah pada tempatnya.

Dalam pelaksanaan retribusi terdapat beberapa hal yang dapat membantu berjalannya program tersebut. Selain Peraturan daerah tentang pelaksanaan retribusi dibentuk juga koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan walikota agar semua pihak ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah. kerapian dan keindahan dambaan setiap orang dalam mengelola lingkungan sekitar. Sampah bisa merusak pandangan dan membuat hati menjadi tidak nyaman ketika sampah bertebaran dimana-mana.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terdapat beberapa hal yang dapat membantu berjalannya program tersebut. Selain Peraturan daerah tentang pelaksanaan retribusi dibentuk juga koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan walikota agar semua pihak ikut serta berpartisipasi dalam

perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi sampah.

Adapun beberapa hal di bawa ini yang membantu berjalannya pelaksanaan retribusi persampah yaitu (1) Sosialisasi mengenai retribusi persampahan perlu dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi karena dengan adanya retribusi berarti pembangunan daerah dapat berjalan dengan berkesinambungan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. sosialisasi didefinisikan sebagai proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. adanya warga yang tidak mengetahui tentang aturan retribusi dan berapa besaran tarif yang mereka harus bayar dan tidak meratanya sosialisasi dari pihak Kecamatan tentang retribusi persampahan sehingga mengakibatkan warga yang kurang

paham tentang retribusi persampahan ini merasa tidak ingin untuk membayar. (2) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan retribusi sangat berpengaruh, berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan yang di lakukan atau partisipasi dalam membayar retribusi. Partisipasi tidak harus dengan balas jasa atau imbalan. keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang

ditentukannya sendiri Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan bukan berarti dapat berjalan dengan lancar, ada banyak hambatan dan kendala yang bisa saja terjadi. sehingga pemungutan retribusi persampahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kendala atau hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kendala yang dihadapi oleh para pelaksana di dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan. kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan retribusi yaitu (1) Perpindahan

penduduk yang di maksud di daerah lokasi penelitian adalah, banyaknya masyarakat yang pindah dari satu daerah ke daerah yang lain, lalu tempatnya tidak di tempati lagi. Berpindah-pindahnya penduduk dari daerah satu ke daerah yang lain menimbulkan masalah berupa tidak stabilnya target retribusi. Para migrancenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan. Faktor paling dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan dan pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan. Daerah tujuan harus memiliki kefaedahan wilayah (place utility) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah asal.

Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi.

Informasi negatif dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migrasi potensial) untuk bermigrasi. Semakin tinggi pengaruh kotaan terhadap seseorang, semakin besar

mobilitasnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya.

Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah tujuan. Jadi, arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini karena banyak dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan, atau epidemi. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas dari pada mereka yang berstatus kawin. (2) Sumber Daya Manusia Sumber daya merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan sebuah program kerja agar efektif dan efisien. Selain itu sumber daya memiliki peranan yang sangat penting dalam perputaran roda organisasi salah satunya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM terdiri dari daya fikir dan daya fisik setiap manusia. Kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya

fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). partisipasi masyarakat sangat diharapkan demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan demi terlaksananya peraturan tersebut. kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah di mana daya pikir masyarakat tentang lingkungan bersih masih sangat kurang. (3) kondisi ekonomi Salah satu faktor penghambat tidak berjalannya retribusi persampahan di kecamatan tamalanrea yaitu kondisi ekonomi masyarakat tamalanrea. Sedangkan kita ketahui sendiri

bahwa kondisi ekonomi adalah sumber dari segala aktifitas yang dapat memperluas pembangunan dan membantu kesejahteraan masyarakat, retribusi persampahan ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis retribusi yang ada dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jika dilihat dari segi potensi wilayah yang ada tentunya penerimaan retribusi persampahan ini akan lebih besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun kenyataannya penerimaan retribusi persampahan cenderung tidak mencapai target. kondisi ekonomi sangat berpengaruh guna melancarkan pelaksanaan retribusi tersebut. (4) pemungutan yang tidak seragam Sesuai yang telah di jelaskan dalam Perwali Kota Makassar No 6 Tahun 2015 bahwa retribusi persampahan di kelompokkan ke beberapa bagian berupa jenis sampah, zona, lokasi, uraian, volume dan tarif/M3. Pelaksanaan dalam hal pemungutan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea belum optimal dimana pihak Kecamatan hanya memperkirakan acuan dalam

penentuan target, tetapi potensi yang ada tidak terdapat sehingga wajar saja jika target tidak tercapai. Padahal dalam penentuan target ini pihak pemerintah perlu melakukan himbauan kepada masyarakat mengenai jumlah pemungutan serta klasifikasi objek retribusi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (a) Pelaksanaan retribusi persampahan di Kecamatan Tamalanrea masih belum bisa dikatakan berjalan dengan baik sehingga hal ini berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kota Makassar yang dapat di jadikan sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menambah infrastruktur wilayah, dan menambah PAD. (b) Pelaksanaan retribusi persampahan terdiri dari sosialisasi, kondisi sumber daya manusia yang masih kurang, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mendukung, dan jumlah armada yang masih kurang sehingga menimbulkan terlambatnya pelayanan untuk masyarakat. (c) Tidak meratanya sosialisasi tentang peraturan retribusi

yang di lakukan oleh pihak yang berwenang mengakibatkan sebagian dari masyarakat tidak memahami tentang wajib retribusi dan berdampak pada target retribusi yang tidak sesuai target. (d) Pelaksanaan retribusi yang di lakukan oleh pihak Kecamatan sudah baik. Namun Kondisi SDM dan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mendukung.

Kemudian di berikan pemahaman tentang Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi agar masyarakat memahami dan mematuhi. Memberikan sanksi yang tegas kepada petugas kolektor jika terdapat ada penyelewengan dan mengambil retribusi dari masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perlunya penambahan jumlah armada kusunya yang bertugas di bagian jalan poros agar pekerjaan lebih efisien dan efektif. Melakukan pembagian tugas terutama di bagian pengawasan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak ada

kecurigaan antarpetugas yang satu dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muninjaya, A. A. Gde. 2004. *Manajemen Kesehatan*. Jakarta: EGC
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Manik, K.E.S, 2003. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Djambatan. Jakarta
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Soejanto, Agoes. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung. Penerbit : PT Remaja Rosdakarya.
- Siahaan Pahala Marhot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi revisi,

Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Susilawati, S., Mappamiring, H.
M. H., & Said, A. (2017).
*Strategi Pengembangan
Pariwisata Pantai Bira
Sebagai Sumber Unggulan
Pendapatan Asli Di Daerah
kabupaten
Bulukumba. Kolaborasi:
Jurnal Administrasi
Publik*, 2(3), 351-366.

